

# EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PADA KANTOR WAHANA LINGKUNGAN HIDUP SULAWESI SELATAN DI KOTA MAKASSAR

Alpen Rante Toding<sup>1</sup>, Risma Niswaty<sup>2</sup>, Haedar Akib<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem informasi manajemen pada kantor Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan unit analisis yang dituju dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan di Kota Makassar, yang melakukan setiap pekerjaan kantor dengan sistem informasi manajemen. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan informan berdasarkan informasi yang diketahui, dan untuk menambah subjek penelitian, digunakan teknik *snow ball sampling*, yaitu memperoleh informan melalui referensi dari informan sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem informasi manajemen pada kantor Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan tergolong efektif, berdasarkan aspek; 1) ketersediaan informasi, 2) informasi mudah dipahami, 3) relevan, 4) bermanfaat, 5) tepat waktu, 6) keandalan, 7) akurat, dan 5) konsisten.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Sistem Informasi Manajemen

## ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of management information systems at the Environmental Forum office in Makassar South Sulawesi. This research is descriptive qualitative analysis unit targeted in this study were employees of the Office of Environmental Forum in Makassar South Sulawesi, who do any office work with management information systems. Sampling techniques in this study using purposive sampling, the choice of informants based on known information, and to increase the research subject, snow ball sampling technique was used, namely obtaining the informant through references from previous informant. The data collection through observation, interviews, and documentation. After collecting the data, the next step is to perform data reduction, data presentation, and conclusion / verification. The results showed that the implementation of management information systems at the office of Environment Forum South Sulawesi relatively effective, based aspects; 1) the availability of information, 2) easy to understand information, 3) relevant, 4) is useful, 5) on time, 6) the reliability, 7) is accurate, and 5) be consistent.

**Keywords:** Effectiveness, Management Information Systems.

---

<sup>1</sup> Alumni Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FIS UNM

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FIS UNM

<sup>3</sup> Ketua Prodi Program Doktor Ilmu Administrasi Publik PPs UNM

## PENDAHULUAN

Saat ini dunia telah memasuki era informasi yang akan berkembang dan terus berkembang. Informasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh semua kalangan baik itu instansi pemerintah, rumah sakit, pertahanan, bisnis, olah raga, maupun pendidikan. Indonesia saat ini menuju kepada masyarakat yang berorientasi kerja. Untuk memandang bahwa kerja adalah sesuatu yang mulia, tidaklah berarti mengabaikan manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Sistem informasi manajemen tersebut bukanlah sesuatu yang baru hadir dalam kehidupan manusia khususnya dalam kegiatan-kegiatan manajemen pada sebuah organisasi. Sistem Informasi Manajemen (SIM) tersebut sebenarnya sudah dikenal sejak dulu namun proses penanganannya masih menggunakan sistem manual. Sedangkan pada saat ini proses penanganan SIM tersebut sudah memanfaatkan kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan sistem komputerisasi ataupun peralatan lainnya yang bermuatan teknologi tinggi.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi (24 April 2014) terlihat bahwa tempat WALHI berkantor saat ini merupakan lokasi yang baru, sedangkan pelaksanaan SIM harus terus berjalan sesuai dengan tujuan WALHI sebagai organisasi yang bergerak dalam berbagai upaya penyelamatan lingkungan hidup. WALHI Sulawesi Selatan menilai kecenderungan kerusakan lingkungan hidup semakin masif dan kompleks baik di pedesaan dan perkotaan, khususnya di Kota Makassar. Memburuknya kondisi lingkungan hidup secara terbuka diakui memengaruhi dinamika sosial politik dan sosial ekonomi masyarakat baik di tingkat komunitas, regional, maupun nasional. Kerusakan lingkungan hidup telah hadir di perumahan, seperti kelangkaan air bersih, pencemaran air dan udara, banjir dan kekeringan, serta energi yang semakin mahal. Individu yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup sulit dipastikan karena penyebabnya sendiri saling bertautan baik antar-sektor, antar-aktor, antar-institusi, antar-wilayah dan bahkan antar-negara.

Berdasarkan fenomena tersebut, bahwa pelaksanaan suatu SIM pada suatu organisasi rumit dan beraneka ragam, di mana di dalam pelaksanaannya banyak sekali yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak organisasi karena pelaksanaan suatu sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi akan sangat membantu dalam kelancaran roda organisasi. Sutabri (2012: 38), menegaskan bahwa sistem informasi bukan merupakan hal yang baru. Yang baru adalah komputerisasinya. Sebelum ada komputer, teknik penyaluran informasi yang memungkinkan manajer merencanakan serta mengendalikan informasi sudah ada. Komputer menambahkan satu atau dua dimensi, seperti kecepatan, ketelitian, dan penyediaan data dengan volume yang lebih besar yang memberikan bahan pertimbangan yang lebih banyak untuk mengambil keputusan. Selain dari pada itu untuk mengetahui efektivitasnya tentu harus memiliki standar penilaian. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Handayani (1996: 34) dan (Baharuddin, Asma, & Niswaty, 2017) mengatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya". Siswanto (1990: 62) mengemukakan bahwa "Efektivitas berarti menjalankan pekerjaan yang besar atau kemampuan untuk memulihkan sasaran yang tepat". Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat ditekan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara tujuan/sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai.

Bernandi dan Russel seperti yang dikutip Gomes dalam Sedarmayanti (2014: 189), menyatakan istilah kinerja dengan performansi adalah sejumlah catatan yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode tertentu. Demikian pula Veithzal (2004), Simamora (1995), Suprihanto dalam Hamzah (2012: 62) menyatakan “kinerja dengan istilah prestasi kerja, yaitu hasil kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya; standar, target, atau kriteria yang telah ditentukan lebih dahulu dan telah disepakati bersama”. Definisi ini menggambarkan bahwa pada kinerja terdapat standar ukuran tertentu untuk mengetahui keberhasilan dan prestasi seseorang atau kelompok. Standar ukuran tersebut dapat berbentuk jumlah hasil pekerjaan atau kuantitas dan kualitas pekerjaannya.

Menurut Hamzah (2012: 89) terdapat enam syarat yang dapat digunakan sebagai alat ukur dalam mengatur efektif atau tidaknya sistem penilaian kinerja, yaitu : a) penilaian (*supervisor*), b) keterkaitan (*relevance*), c) kepekaan (*sensitivity*), d) keterandalan (*realibility*), e) kepraktisan (*practicality*), dan f) dapat diterima (*acceptability*). Mitchell dalam Sedarmayanti (2009: 51), mengemukakan bahwa “Kinerja meliputi lima aspek, : 1) kualitas hasil kerja (*quality of work*), 2) ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan (*promtness*), 3) prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan (*initiative*), 4) kemampuan menyelesaikan pekerjaan (*capability*), dan 5) kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain (*communication*)”.

Mengetahui efektivitas kinerja suatu sistem informasi manajemen berbasis komputer, tentunya SIM merupakan penunjang kinerja organisasi, pendukung dalam pengambilan keputusan dan penyalur informasi. Penelitian ini berargumen mengenai dukungan-dukungan atau peranan SIM yang diterapkan di lingkungan Kantor Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan, serta faktor utama yang menghambat proses implementasi SIM tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji satu variabel atau variabel tunggal. Variabel tunggal merupakan variabel yang tidak mengkaji interaksi ataupun hubungan antar variabel. Sedangkan Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana efektivitas pelaksanaan sistem informasi manajemen pada Kantor Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan di kota Makassar. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan informan berdasarkan informasi yang diketahui, dan untuk menambah subjek penelitian, digunakan teknik *snow ball sampling*, yaitu memperoleh informan melalui referensi dari informan sebelumnya. Menurut Sugiyono (2010: 219) “*snow ball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit dan lama-lama menjadi besar”. Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai yang aktif pada Kantor Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan berjumlah 35 orang. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan, Setelah dilakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan proses analisis data. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010: 246-253) membagi langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan penelitian kualitatif yang meliputi: a) Reduksi data, b) Penyajian data, dan c) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berusaha menjawab suatu permasalahan pokok, yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen pada kantor Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Setelah data hasil penelitian disajikan dan diolah, maka diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen pada kantor Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan di Kota Makassar tergolong efektif. Persepsi ini didasarkan pada beberapa komponen syarat-syarat penting informasi yang baik, telah dipenuhi dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen. Syarat tersebut meliputi ketersediaan informasi, informasi mudah dipahami, relevan, bermanfaat, tepat waktu, keandalan, akurat, dan konsisten.

### Ketersediaan informasi

Ketersediaan merupakan syarat mendasar bagi suatu informasi, yaitu menyangkut tersediannya informasi itu sendiri. Ketersediaan informasi di WALHI diperoleh dari berbagai sumber. Menurut keterangan dari Bapak Asmar Exwar (Direktur Eksekutif WALHI Sulsel) menyatakan bahwa ketersediaan informasi sangat tersedia berupa data-data yang tentunya berkaitan dengan Penyelamatan Sumber Daya Alam (Wawancara 22 Desember 2014, di ruang *meeting*, WALHI Sulsel). Misalnya data yang berasal dari salah satu sumber yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang menyebutkan laju kerusakan hutan Sulsel mencapai sepuluh koma enam persen dengan tingkat kerusakan hutan mencapai tiga puluh koma enam persen. Ini artinya kerusakan hutan di Sulsel berpotensi besar memicu terjadinya banjir, tanah longsor, kekeringan bahkan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh seorang informan yaitu Ibu Rizky (Kadiv SPD dan POR WALHI Sulsel) menyatakan bahwa WALHI sangat terbuka terkait dengan ketersediaan informasi. Siapapun yang butuh informasi boleh datang, ataupun yang ingin memberikan informasi agar jaringan kerja WALHI semakin luas. (Wawancara 22 Desember 2014, ruang *meeting*). Hal itu sejalan dengan tujuan strategis WALHI yaitu organisasi WALHI mandiri dan profesional dalam advokasi lingkungan berbasis pada rakyat (*grass root*), Pemerintahan yang baik dan bersih yang mampu menjamin adanya kebijakan negara terhadap perlindungan kawasan ekologi genting sebagai sumber-sumber kehidupan rakyat, dan rakyat memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupannya.

### Informasi yang mudah dipahami

Mudah dipahami artinya informasi harus mudah dipahami oleh pembuat keputusan baik informasi yang menyangkut pekerjaan rutin maupun keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Dari wawancara yang dilakukan peneliti, informasi yang ada mudah dipahami oleh orang awam sekalipun dan tidak menimbulkan multi tafsir. Menurut keterangan Bapak Asmar Exwar, ada data/informasi yang mudah diolah, namun ada juga data yang perlu dianalisis sebelum diolah. Hal ini senada dengan pernyataan Ibu Rizky yang menyatakan bahwa informasi mudah

dipahami tergantung konteksnya, misalnya informasi tersebut berhubungan dengan advokasi terhadap perusahaan pertambangan, maka itu bukan merupakan hal yang begitu sulit. (Wawancara 16 Februari 2015, pukul 16.31 di ruang *meeting* WALHI Sulsel). Untuk persoalan isu-isu pertambangan, sekarang tidak hanya bermain di konteks wilayah teman-teman NGO tetapi juga telah menjadi salah satu yang paling disoroti oleh KPK bahkan KPK menyanding semua NGO baik dari WALHI, KPA, AMAN dan semua NGO untuk berkontribusi melakukan pengawasan. Misalnya NGO dari WALHI Sulsel, KPK meminta agar memberikan prioritas terhadap 3 kabupaten (Maros, Pangkep dan Barru) yang dianggap rentan terindikasi terhadap banyaknya izin-izin usaha pertambangan. Jadi tiga daerah itu akan disupervisi oleh WALHI dan KPK. Jadi, dalam beberapa kasus memang harus dianalisis dahulu, karena berbicara tentang undang-undang dan tentang aturan-aturan kadangkala telah berubah dan sudah tidak berlaku pada saat sekarang.

Demikian halnya WALHI Sulsel atau teman-teman aliansi dalam mengadvokasi suatu kasus di mana WALHI pernah melakukan pemetaan partisipatif yang menghasilkan suatu peta, tetapi kemudian itu merupakan peta yang dulu, sementara advokasi terhadap kasus tersebut masih belum berhenti sampai sekarang. Ketika ada teman-teman yang bertanya misalnya apakah WALHI sudah pernah membuat peta namun kemudian misalnya wilayah kelola masyarakat yang berkonflik dengan korporasi itu mungkin sudah semakin menyempit atau bahkan meluas, jadi harus ada agenda pemetaan partisipatif baru untuk melakukan pemetaan ulang.

### Informasi yang relevan

Relevan, artinya informasi harus relevan dengan keadaan yang seharusnya dan dapat berkembang sesuai dengan keadaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, informasi yang tersedia sudah relevan dengan keperluan WALHI. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Asmar Exwar yang menyatakan bahwa informasi yang ada harus relevan, yaitu harus relevan dengan fokus kerja WALHI di mana menyangkut hal-hal yang terkait dengan PSDA (Penyelamatan Sumber Daya Alam), misalnya sengketa lahan, permasalahan agraria, pertambangan, dan lain-lain. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Rizky yang menyatakan bahwa, informasi yang tersedia di WALHI harus relevan. (Wawancara 22 Desember 2014, ruang *meeting*). Fokus kerja WALHI yang menyangkut PSDA misalnya upaya penyelamatan lingkungan dari bencana ekologis. Data WALHI menyebutkan tidak satu pun provinsi di Indonesia bebas dari ancaman bencana ekologis. Pada kurun waktu 2013 saja telah terjadi 776 kali bencana yang melanda 3.846 desa/kelurahan yang tersebar di 1.584 kecamatan dan 311 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Makassar memiliki ancaman seperti banjir, angin puting beliung, dan kebakaran. Dengan kondisi *multy hazard* tersebut, Pemerintah dan warga kota tentunya harus selalu berupaya meminimalisir risiko agar terhindar dari bencana yang sesungguhnya.

Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia merupakan merupakan salah satu pemicu utama ancaman bencana ekologis. Bencana ekologis merupakan akumulasi krisis ekologis yang disebabkan oleh ketidakadilan dan gagalnya sistem pengurusan alam yang telah mengakibatkan hancurnya ranata kehidupan masyarakat. Pada dasarnya bencana ekologis terjadi karena ulah manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Ancaman bencana ekologis ditandai

dengan degradasi lingkungan hidup, peningkatan alih fungsi lahan dan hutan, peningkatan risiko atas keselamatan rakyat, serta kerusakan keanekaragaman hayati. Krisis lingkungan sebagai pemicu bencana ekologis disebabkan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan dan masyarakat. Alih fungsi lahan resapan air menjadi pemukiman akan berdampak pada meningkatnya potensi banjir. Alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, tambang, energi atau pemukiman baru berpotensi meningkatkan ancaman banjir dan tanah longsor. Perencanaan tata ruang yang tidak pro lingkungan akan berpotensi meningkatkan ancaman bencana ekologis bagi masyarakat. Dari sekitar 4 juta hektar lebih luas daratan Sulawesi Selatan, setengahnya atau sekitar 2 juta hektar adalah kawasan hutan dan banyak berada pada wilayah dataran tinggi. Dalam satu dekade terakhir, ekspansi investasi sektor SPDA telah membuat kerusakan hutan di Sulsel semakin parah.

### **Informasi memiliki manfaat**

Bermanfaat artinya informasi harus bermanfaat bagi organisasi. Informasi yang diterima oleh WALHI sangat bermanfaat. Dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa dengan adanya informasi yang diperoleh WALHI maka dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Bapak Asmar Exwar menyatakan bahwa, informasi yang diperoleh WALHI dapat bermanfaat untuk konteks advokasi (Wawancara 22 Desember 2014, pukul 14.00 di ruang *meeting*, WALHI Sulsel). Hal itu didukung juga oleh pernyataan dari Ibu Rizky (Wawancara 16 Februari 2015, pukul 16.31 di ruang *meeting* WALHI Sulsel) yang menyatakan bahwa WALHI terlibat secara aktif dalam proses advokasi kebijakan yang tidak pro lingkungan dan tidak pro rakyat, misalnya konflik agraria perkebunan antara PTPN XIV (Pabrik Gula) dan warga di beberapa kabupaten (Wajo, Takalar, Enrekang), advokasi reklamasi pesisir pantai Losari, serta advokasi penyelamatan kawasan Karst.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh salah seorang informan yaitu Bapak Andi Suaib selaku Dewan Daerah Bagian Pengawasan WALHI Sulsel yang menyatakan bahwa semua informasi dianggap *urgen* yang nantinya dapat dirangkai menjadi satu kesatuan. (Wawancara 22 Desember 2014, di ruang *meeting*, WALHI Sulsel). Jadi informasi yang diterima oleh WALHI baik yang memiliki skala kecil maupun skala besar maka WALHI menganggap hal itu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk nantiya dapat dipergunakan oleh WALHI dalam proses advokasi.

### **Informasi tersedia tepat waktu**

Tepat waktu artinya informasi harus tersedia pada waktunya, hal ini bermanfaat ketika manajer hendak mengambil suatu keputusan. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian, WALHI selalu menyediakan informasi bagi siapa saja yang membutuhkan informasi mengenai PSDA. Sebaliknya, jika WALHI membutuhkan data atau informasi dari beberapa sumber misalnya dari instansi atau Pemerintah, terkadang informasi tersebut tidak tersedia saat itu juga sehingga WALHI harus menunggu sampai data tersebut diberikan oleh dinas atau instansi terkait. Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Asmar Exwar yang menyatakan bahwa informasi kadang tidak tersedia tepat pada waktu dibutuhkan, biasanya membutuhkan waktu untuk memperoleh informasi misalnya dari instansi yang berkaitan (Wawancara 22 Desember 2014, di ruang *meeting*, WALHI Sulsel).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Ibu Rizky yang menyatakan bahwa WALHI selalu menyediakan informasi yang terkait dengan fokus kerja WALHI, yaitu bergerak di bidang advokasi lingkungan hidup, demokratisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika ada orang atau organisasi yang membutuhkan informasi mengenai upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup akan diberikan, apabila belum cukup maka akan dicarikan atau diarahkan ke pihak lain yang juga berhubungan dengan informasi tersebut (Wawancara 22 Desember 2014, di ruang *meeting* WALHI). Contohnya jika teman-teman wartawan meminta informasi mengenai sejauh mana pendampingan WALHI terkait advokasi penyelamatan Karst, misalnya apa yang sudah dilakukan WALHI, data terkait izin usaha pertambangan yang ada di sana, data WALHI yang sudah dirapatkan di lapangan maka WALHI tidak segan untuk memberikan informasi sesegera mungkin. Hal itu penting karena teman-teman wartawan yang akan membuat tulisan itu bisa melakukan *crosscek* ke lapangan atau dinas-dinas terkait misalnya Dinas ESDM di Maros, WALHI juga senantiasa melakukan *share* informasi ke publik supaya publik tahu apa saja agenda-agenda yang telah, sedang atau yang akan WALHI lakukan kedepannya. Bahkan untuk advokasi Karst Sulsel akan menjadi agenda advokasi nasional, karena semakin luas dukungan advokasi WALHI maka akan berdampak positif terhadap hasil yang akan didapatkan.

### **Keandalan sumber informasi**

Keandalan artinya informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang diandalkan kebenarannya. Dari wawancara yang dilakukan peneliti, informasi yang diperoleh WALHI berasal dari berbagai sumber yang dapat diandalkan. Pernyataan ini didukung oleh Bapak Asmar Exwar yang menyatakan bahwa informasi didapatkan dari lembaga pemerintahan baik dari tingkat desa hingga nasional. Misalnya dinas-dinas seperti Balai Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini senada dengan pernyataan Bapak Andi Suaib yang menyatakan bahwa informasi didapatkan dari Pemerintah, Publik, ataupun dari internet (Wawancara 22 Desember 2014, di ruang *meeting*).

Misalnya kasus antara PTPN XIV dengan masyarakat di Kabupaten Wajo, WALHI rutin melakukan pertemuan dengan warga untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam agenda yang dinamakan Temu Kampung. Konflik di Kabupaten Wajo yang terjadi di Kecamatan Keera yang terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan, jadi ada 10 wilayah yang berkonflik dengan PTPN XIV terkait HGU (Hak Guna Usaha) yang sudah selesai. Awalnya WALHI melakukan pertemuan yang intensif dengan warga tiap desa, kemudian ada namanya pertemuan kampung, lalu ke DPRD, bertemu dengan Kepala BPN Kabupaten Wajo, kemudian bertemu dengan Kepala BPN Provinsi, kemudian bertemu dan mengadakan perjanjian dengan Bapak Kapolda Sulselbar, sampai bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati Wajo. Semua hal itu WALHI lakukan demi mendapatkan informasi yang dapat diandalkan kebenarannya sehingga dapat memudahkan WALHI dalam melakukan proses advokasi.

### Keakuratan informasi

Akurat artinya bahwa informasi bersih dari kesalahan dan kekeliruan. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, informasi yang ada kadang kurang akurat namun sebagian besar sudah akurat. Bapak Asmar Exwar menyatakan bahwa, informasi dari pemerintah kadang kurang akurat, misalnya mengenai angka batas-batas wilayah, oleh karena itu perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum diolah. Pendapat dari informan lain yaitu Bapak Andi Suaib yang menyatakan bahwa soal akurasi tergantung konteksnya. Informasi merupakan suatu awal untuk nantinya dapat bekerja. Akurat iya, tapi tidak semua informasi seratus persen valid. (Wawancara 22 Desember 2014, di ruang *meeting*). Misalnya wilayah Sulawesi, WALHI di Regional Sulawesi dan Regional Banusramapa telah mendorong upaya pengambilalihan kembali dan pendudukan lahan baik milik adat, perusahaan dan negara. Dalam kurun waktu satu tahun, rakyat di regional Sulawesi dan regional Banusramapa mampu merebut 24.000 ha dan mempertahankan 78113,8 ha kawasan Ekologi genting di 8 (delapan) kawasan. Selain melakukan pengambilalihan dan pendudukan lahan, warga juga telah berupaya melakukan restorasi/pemulihan lingkungan.

### Informasi yang konsisten

Konsisten artinya informasi tidak boleh kontradiksi di dalam penyajiannya karena konsistensi merupakan syarat penting bagi pengambilan keputusan. Menurut keterangan dari Bapak Asmar Exwar, informasi harus konsisten artinya informasi yang ada di WALHI tidak berubah-ubah. Informan lain yaitu Bapak Andi Suaib mengatakan bahwa, informasi yang disajikan harus konsisten karena telah melalui tahapan proses kerja yang nantinya akan mempunyai dampak. WALHI memiliki sikap tidak akan menarik mundur kebijakan yang telah diputuskan (Wawancara 22 Desember 2014, di ruang *meeting* WALHI). WALHI memiliki sikap konsisten sehingga terlepas dari segala bentuk indoktrinasi termasuk dari pemerintah ditandai dengan kesepakatan aktivis ornop untuk menetapkan tiga asas organisasi non pemerintah (ornop) yang bergabung dengan WALHI, yaitu asas mandiri, bekerjasama tanpa ikatan, dan bekerja nyata bersama dan untuk masyarakat. Untuk itulah, dibutuhkan kepekaan untuk membaca persepsi masyarakat, agar program yang dijalankan oleh WALHI sesuai dengan keinginan rakyat. Dengan hal ini, jelas bahwa WALHI bukan hanya oleh dan untuk kelompok lingkungan, namun WALHI menjadi milik publik. Di mana publik secara bersama-sama membangun kekuatan untuk melawan ancaman yang tidak hanya datang dari dalam namun juga ancaman yang datangnya dari luar.

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan data hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaksanaan sistem informasi manajemen pada Kantor WALHI Sulawesi Selatan di Kota Makassar sudah berjalan dengan efektif. Persepsi ini didasarkan pada beberapa komponen syarat-syarat penting informasi yang baik, telah dipenuhi dan dijalankan



sesuai aturan yang berlaku dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen. Syarat tersebut meliputi ketersediaan informasi, informasi mudah dipahami, relevan, bermanfaat, tepat waktu, keandalan, akurat, dan konsisten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin, A., Asma, A., & Niswaty, R. (2017). Efektivitas Kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ad'ministrare*. <https://doi.org/10.26858/ja.v4i1.3440>
- Hamzah, dkk. 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Buku Aksara.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1996. *Pengantar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sedarmayanti. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Adiatma.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Siswanto. Bejo. 1990. *Manajemen Modern, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Sinar Biru.
- Veithzal, Rivai. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*, edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sutanta, Edhy. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi berbasis Komputer*. Jakarta : Erlangga.
- Winardi. 1987. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Nova.